

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001
TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH
DI ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH CABANG SEMARANG

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHAMMAD SYUKRON

NIM : 2 1 0 3 2 3 7

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. II Ngaliyan Telp. 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Muhammad Syukron

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas
Syari'ah**
IAIN Wasilsongo
Di-Semarang

Assalmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Muhammad Syukron**
NIM : **2 1 0 3 2 3 7**
Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH DI ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH CABANG SEMARANG**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 10 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag
NIP. 150 231 628

Rahman El-Junusy, SE. M.M
NIP. 150 301 637

**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “WALISONGO”
FAKULTAS SYARI’AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syukron

Nim : 2 1 0 3 2 3 7

Jurusan : Mu’amalah

Judul skripsi : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH DI ASURANSI SYARI’AH MUBARAKAH CABANG SEMARANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 31 Juli 2008 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana strara 1 (S.1) tahun akademik 2007/2008

Semarang, 31 Juli 2008

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. Sahidin. M.S.i
NIP. 150 263 235

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag
NIP. 150 231 628

Penguji I,

Penguji II,

Moh. Arifin, M.Hum
NIP. 150 279 720

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag
NIP. 150 231 628

Rahman El-Junusy, SE. M.M
NIP. 150 301 637

ABSTRAK

Bahwasannya asuransi pada masa ini sudah tidak lagi berorientasi secara murni (*pure*) terhadap semangat tolong-menolong dan lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia modern. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya paham kapitalisme dengan berbagai instrument yang mendukungnya, sehingga dalam kondisi ini terjadi pelencengan misi, yaitu asuransi telah terbelenggu dalam rantai kapitalis-materialis.

Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang merupakan salah satu instansi asuransi syari'ah yang tergolong masih baru, yang mempunyai misi menjadi perusahaan asuransi syari'ah nasional yang paling efisien, paling aman dan terpercaya sehingga mampu memberikan manfaat yang berarti dan perlindungan yang paling aman kepada setiap nasabahnya. Dan dengan melihat hal tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan pelaksanaan produk yang ada di Asuransi Syari'ah Mubarakah Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang, untuk memperoleh data yang valid dan dalam penyusunannya penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data tersebut penulis kumpulkan melalui metode interview, dokumentasi dan observasi, serta analisa datanya adalah analisa deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menguraikan penelitian yang apa adanya.

Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam kinerjanya berpedoman pada fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, dan dalam operasionalnya implementasi fatwa tersebut telah terealisasi. Selain itu Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang juga menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip dasar asuransi syari'ah.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan penuh tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Agustus 2008

Deklarator,

Muhammad Syukron
NIM. 2 1 0 3 2 3 7

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH DI ASURANSI SYARI’AH MUBARAKAH CABANG SEMARANG”**. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan muamalah Fakultas Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah. Pasang surut semangat penulis antara yakin dan tidaknya dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Jamil, MA, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

3. Dra. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rahman El-Yunusi, SE, MM, selaku dosen pembimbing II. Beliauah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi dan penulisan skripsi ini.
4. Yth. Bapak dan Ibu dosen serta segenap karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
5. Ayahanda tercinda M. Syaifuddin (Almarhum), semoga sejahtera dan selalu mendapat rahmat dari Allah SWT. Amien.
6. Ibunda tercinta dan seluruh keluarga besar yang selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang dengan ikhlas, serta tiada hentinya berdo'a demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kakak-kakakku tercinta, semoga selalu menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Dan adik-adikku tersayang, semoga selalu rajin dalam menuntut ilmu.
8. De' lin cahaya hatiku, yang setia menemani dan selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. (Semoga hubungan kita selalu abadi dan do'a-do'a kita dikabulkan Allah, Amien).
9. Semua temen-temen kost cendana Segaran Baru Purwoyoso Ngaliyan yang selalu mewarnai perjalanan hidup penulis dalam menuntut ilmu. (Acunk, Agung, Mail, Afud, Safi, Aidy, Gus Irkham, Gombal, Ucok, Nurul, Arief, Rodhi, Aji, dan Try), Samsul kipli, Erwin, dan khususnya buat temen sekamarku Maz Blankon.

10. Semua temen-temen seperjuangan, Ida kudos, Murni, Ni'mah, Fatma, Istianah, Khusna Tompel, Mas Piek, Amoel, Nawar dan buat Sulis, Yusuf, Ani Hanifah, Miftah, Rifqi Ndut, Danu, A6, Safa', tetap semangat ya....
11. Seluruh teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari pembaca sangat penulis harapkan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan umumnya bagi para pembaca. Serta hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk & berserah diri, Amien.

Semarang, 06 Agustus 2008

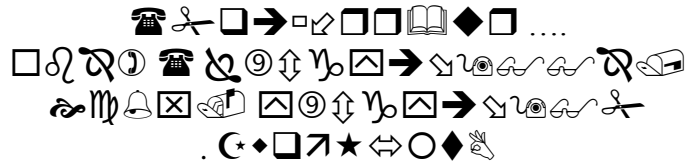
Penulis

Muhammad Syukron
NIM. 2103237

MOTTO

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا
وَأَعْمَلْ لْآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا.

“Kerjakanlah urusan duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Dan kerjakanlah amalan akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati besok” (HR. Bukhori).



“...Dan penuhilah janji;
sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra’; 34)

PERSEMBAHAN

Langkah pasti

Yang cu'onk miliki

Tak akan berarti

Tanpa mereka disisi

Sebagai rasa peduli

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk:

Abah dan Ibu yang Cu'onk cintai

Kakak dan adik-adikku yang Cu'onk sayangi

Keponakan-keponakanku yang Om Cu'onk banggakan

De' Iin sang cahaya hatiku "I Love U Forever"

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
 BAB II : FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH	
A. Sekilas Dewan Syari'ah Nasional	20
B. Kedudukan dan Tugas	23
C. Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan Metode Istimbath Ulama DSN-MUI Dalam Menetapkan Fatwa N0. 21/DSN-MUI/X/2001.....	26
1. Fatwa DSN-MUI.....	26
2. Metode Istimbath Ulama DSN-MUI.....	36
D. Asuransi Syrai'ah.....	41

**BAB III : IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI DI
ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH CABANG
SEMARANG**

A. Sejarah Berdirinya Asuransi Syari'ah Mubarakah	44
1. Legalitas.....	46
2. Profil Perusahaan	46
3. Struktur Organisasi	47
4. Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang	48
B. Visi dan Misi Asuransi Syari'ah Mubarakah	51
C. Produk-produk Asuransi Syari'ah Mubarakah	52
D. Implementasi Fatwa DSN-MUI Di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang	59

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI
FATWA NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG
PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH**

A. Analisis Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI Di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.....	64
B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Produk-Produk Di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.....	73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal serta sebagai suatu sistem hidup (*way of life*) mempunyai keunikan tersendiri. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Dalam hal sosial, muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Oleh karena itu universalitas dalam bidang muamalah tampak jelas, selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh *Sayyidina Ali*, yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio:

“Dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita, dan hak mereka adalah kita”.¹

Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, bahwa asuransi pada masa ini sudah tidak lagi berorientasi secara murni (*pure*) terhadap semangat tolong-menolong, tetapi lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia modern, disamping lembaga

¹ Kutipan hadis *Sayyidina Ali* oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta, Gema Insani, 2001, hlm. 4.

perbankan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya paham kapitalisme dengan berbagai instrument yang mendukungnya, seperti semangat liberalisme dan individualisme yang telah membawa peradaban manusia pada situasi yang lebih mementingkan diri sendiri dan hanya sekedar mengejar kepentingan materialistik. Dalam kondisi ini terjadi pelencengan misi, yaitu asuransi telah terbelenggu dalam rantai kapitalis-materialis. Semangat tolong menolong telah terpuruk dalam jurang kenistaan dan telah diganti dengan keserakahan serta keangkaramurkaan oleh manusia-manusia yang otaknya dilumuri oleh semangat individualistik-materialistik, sehingga hal tersebut menjadi warna yang tidak dapat dipisahkan dalam operasional asuransi.

Sebagai lembaga keuangan nonbank, asuransi terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan *booming*-nya semangat revolusi industri di kalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.²

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syari'ah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syari'ah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syari'ah baik di kota besar maupun di berbagai pelosok daerah. Hal ini disebabkan karena

² AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam*, Jakarta Prenada Media, 2004, hlm. 6.

masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syari'ah, khususnya asuransi syari'ah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.³

Pada awalnya asuransi adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang, yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga.⁴ Bentuk tradisional asuransi merupakan perkumpulan saling menanggung secara bergotong royong yang mengumpulkan dana dari anggota secara teratur pada setiap bulannya. Dalam tradisi lain menunjukkan gotong royong keluarga untuk menanggung kelangsungan hidup, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, disebabkan oleh suatu peristiwa tidak tentu (*Onzeeker Voorval*).⁶ Definisi lain mengatakan asuransi adalah suatu alat sosial yang menggabungkan resiko-resiko individu

³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta, Gramedia, 2006, hlm. 2.

⁴ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, hlm. 3.

⁵ Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 1.

⁶ AM. Hasan Ali, Op.Cit., hlm 59.

ke dalam suatu kelompok dan menggunakan dana yang disumbangkan oleh anggota-anggota kelompok tersebut untuk membayar kerugian-kerugian.

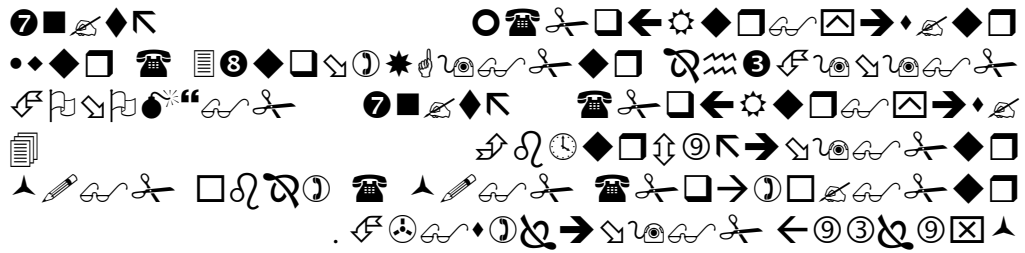
Asuransi bertujuan untuk pemeratakan beban kerugian dengan memakai dana-dana yang disumbangkan oleh para anggota kelompok tersebut untuk pembayaran kerugian. Jadi asuransi itu adalah alat pemerataan kerugian, untuk mengurangi beban ekonomi para anggota kelompok itu, maka penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian. Akan tetapi tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan maupun pencegahan kerugian, melainkan mengurangi *untertainty* (ketidakpastian atau keraguan) yang disebabkan oleh kesadaran akan kemungkinan kerugian. Karena asuransi memberikan kepastian kepada masing-masing anggota kelompok itu dengan pemeratakan biaya kerugian.⁷

Asuransi dalam literature keislaman lebih banyak bernuansa sosial dari pada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam. Maka tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada profit, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) yang menjadi landasan utama (*eminent*), dan visi ekonomi (*economic vision*) yang merupakan landasan perifer.⁸

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah : 2 tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam berbuat positif :

⁷ A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm 170

⁸ AM. Hasan Ali, *Op.Cit.*, hlm. 55.



Artinya: “.....Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya”. (QS. Al-Maidah : 2)⁹

Falsafah yang mendasari asuransi syari’ah adalah bahwa umat manusia adalah keluarga besar kemanusiaan. Agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus tolong–menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dan yang lain. Takaful yang berarti saling menanggung antar-umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar pijakan tersebut, di antara peserta bersepakat menanggung bersama di antara mereka atas resiko yang diakibatkan oleh kematian, kebakaran, kehilangan dan sebagainya. Dengan demikian, sistem asuransi syari’ah harus bersifat universal, berlaku secara umum.¹⁰

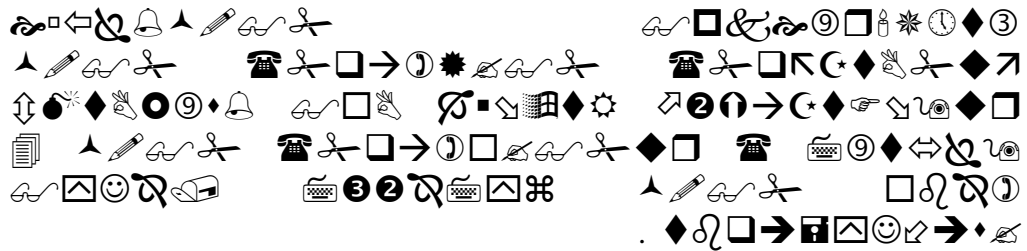
Dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Dan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, asuransi merupakan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 157

¹⁰ Abdullah Amrin, *Op.Cit.*, hlm. 3.

persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan (apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah).¹¹

Selaras dengan firman Allah SWT tentang perintah mempersiapkan hari depan, yang berbunyi :



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, bertakalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Hasyr : 18).¹²

Asuransi syari'ah dikenal juga dengan nama takaful yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung, sedangkan dalam pengertian muamalah berarti saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara yang satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Hal itu dikenal dengan *sistem sharing of risk*. Sistem yang dijalankan dalam asuransi syari'ah ini didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana tabarru atau dana ibdah, sumbangan dan derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Konsep dan perjanjian asuransi (*'aqdu at-ta'miin*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang

¹¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Edisi Revisi Tahun 2006. hlm. 123.

¹² Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 919.

hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat tersebut muncul dari para ulama fiqih masa kini (*mu'assirah*). Di antara mereka, ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi, dan sebagian yang lainnya melarang dan mengharamkannya. Dan adapula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya, atau jenis-jenis asuransi tertentu saja.¹³

Adapun pendapat ulama yang mengharamkan asuransi di antaranya adalah :

Dr. Muhammad Muslehuddin (*Guru Besar Hukum Islam Universitas London*), dalam disertasi doktornya yang berjudul “*Insurance and Islamic Law*” mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan berbagai alasan, sementara penyokong modernis Islam berkeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam. Keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut :

1. Asuransi merupakan kontrak perjudian.
2. Asuransi hanyalah pertaruhan.
3. Asuransi bersifat tidak pasti.
4. Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan.
5. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal.

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah* (Life and General), Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 58

6. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (*sekuritas*) berbunga. Dan dalam hal asuransi jiwa, si peserta asuransi atas kematiannya, berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya, hal tersebut merupakan riba (bunga).
7. Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba, hukumnya haram. Karena itulah, para ulama dengan keras menyatakan perang terhadap asuransi, dan secara tegas berpendapat bahwa kontrak asuransi secara diametrik bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam (asuransi berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti).

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili (*Ulama Fiqih dan Guru Besar Universitas Damaskus Syria*), dalam kitab fiqihnya yang sangat masyhur “*Al-Fiqih Al-Islami Wa ‘Adillatuhu*” mengatakan bahwa pada hakekatnya akad asuransi termasuk dalam ‘*aqd ghrrar*’ yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan. Padahal, Nabi Muhammad saw. melarang jual beli gharar. Jika diqiyaskan kepada akad pertukaran harta, maka akad asuransi memberi kesan gharar seperti gharar yang tedapat dalam akad jual beli.¹⁴

Pendapat ulama yang membolehkan asuransi, di antaranya adalah:

Syaikh Abdur Rahman Isa (*Salah Seorang Guru Besar Universitas Al-Azhar*). Dengan tegas menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian

¹⁴ *Ibid* hlm. 62-63

juga para sahabat Nabi. Menurut beliau, pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak dan ulama juga telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara' patut diamalkan. Oleh karena asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut *syara'*.

Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (*Guru Besar Universitas Kairo*), mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Ia mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian, apabila nasabah masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan, tanpa adanya tambahan. Tetapi manakala sang nasabah meninggal sebelum batas akhir penyetoran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang tercantum dalam polis, dan ini halal menurut ukuran *syara'*.

Prof. Dr. Muhammad al-Bahi (*Wakil Rektor Universitas Al-Azhar Mesir*), dalam kitabnya *Nidlomot Ta'min fi Hadighi Ahkamil Islam wa Dlarurotil Mujtamil Mu'ashir*, ia berpandangan bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab.

1. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.
2. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda.

3. Asuransi tidak mengandung unsur riba.
4. Asuransi tidak mengandung tipu daya.
5. Asuransi tidak mengurangi tawakkal kepada Allah swt.
6. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.
7. Asuransi memperluas lapangan kerja baru.¹⁵

Asuransi Syari'ah Mubarakah adalah salah satu sister company EASCO GROUP; Perusahaan Nasional dengan beberapa anak perusahaan di Indonesia maupun luar negeri. Kesatuan ini memberikan gambaran yang kuat terhadap dukungan teknis dan permodalan serta rasa aman berinvestasi bagi “*ummat*”.

Dengan berlandaskan konsep penentuan daerah yang mempunyai potensi bisnis bagi pembukaan kantor cabang Asuransi Syariah Mubarakah. Kota Semarang merupakan salah satu alternatif lokasi kantor cabang yang memiliki prospek bisnis di masa depan. Maka pada tanggal 01 Juli tahun 2007 untuk pertama kali dibukalah Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang di Jalan Ronggolawe yang kemudian pindah di Jalan Gajahmada Blok C No. 9 E Plaza Semarang Telp. (024) 8311066, fak. (024) 8311063.

Adapun Visi dan Misi Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) adalah sebagai berikut :

- Visi : “ *Baldatun Thoyyiban Warabbun Ghafur* “ (QS. 34 : 15)

¹⁵ *Ibid* hlm. 71-73

Membawa Umat menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan di bawah perlindungan Allah SWT.

- Missi : “ *menjadi* perusahaan asuransi syari’ah nasional yang paling efisien dan paling aman dan terpercaya di Indonesia sehingga kami mampu memberikan manfaat yang berarti dan perlindungan yang paling aman kepada setiap pemakai jasa keuangan kami.”
- Budaya ASM : Ekonomi syari’ah memberikan batasan kepada kita untuk membedakan dengan jelas dan terang antara yang hak dan yang bathil, yang hitam dan yang putih, yang halal dan yang haram. Konsep “*Dari Ummat*” adalah menginvestasikan kembali, dengan tujuan untuk mengangkat ekonomi lebih baik dengan investasi yang menguntungkan dan perlindungan keuangan terhadap sesama.

Dewan Syari’ah Nasional merupakan dewan yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani berbagai masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan. Anggotanya terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari’ah.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik membahas Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah di Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang Semarang.

¹⁶ Abdullah Amrin, Op.Cit., hlm. 231.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.
2. Bagaimana pelaksanaan produk-produk yang ada di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki maksud dan tujuan yang berpijak pada landasan tersebut diatas, maka terdapat beberapa hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan produk-produk yang ada di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dengan berdasarkan hal tersebut penulis berusaha menelaah buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas, diantaranya adalah:

Pertama, Muhaimin Iqbal dalam bukunya yang berjudul “*Asuransi Umum Syari’ah dalam Praktik : Upaya menghilangkan gharrah, maisir, dan riba*” menjelaskan bahwa asuransi syari’ah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari’ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

Kedua, Muhammad Syakir Sula dalam bukunya yang berjudul “*Asuransi Syari’ah (Life And General, Konsep dan Sistem Operasional)*” menjelaskan bahwa Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’ dana Ibadah, Sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Analisis Perubahan Sistem Operasional Dari Asuransi Konvensional Ke Asuransi Syari’ah*” oleh Khikmatun Nasifah angkatan tahun 2001, yang dalam skripsinya membahas mengenai pelaksanaan asuransi syari’ah di PT. Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang Kendal dan terhadap perubahan sistem operasional dari asuransi

konvensional ke asuransi syari'ah. Bahwa pada awalnya Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Kendal dalam sistem operasionalnya masih mengacu pada asuransi konvensional, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan dengan adanya fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, maka Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Kendal sistem operasionalnya berpedoman pada asuransi syari'ah.

Keempat, skripsi Imroatus Sholikhah skripsi dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji” skripsi ini membahas tentang asuransi haji, yang mana DSN-MUI dalam fatwanya menetapkan bahwa asuransi haji boleh dilakukan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional. Karena asuransi haji tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tanpa mengesampingkan pendapat para ulama.

Dari uraian diatas, maka penulis mengetahui banyak hal yang perlu dikaji dalam asuransi. Dan dalam penelitian ini penulis membahas “Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang”. Yang mana maksud dari penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam kinerjanya telah menerapkan fatwa tersebut.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan *field study*¹⁷ yaitu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lembaga pelaksana proyek dalam hal ini Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang, dengan cara pendekatan kualitatif. Tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial : individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Adapun obyek penelitian di sini penulis mengambil hal-hal yang berkenaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pedoman umum asuransi syari'ah di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁸ Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku perpustakaan, makalah, artikel dan

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998, hlm 107

sebagainya.¹⁹ Sedangkan Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi dari perusahaan Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.

3. Metode pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Interview

Interview atau wawancara merupakan suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih, yang duduknya saling berhadapan secara fisik dan hal tersebut didasarkan pada suatu masalah tertentu.²⁰

Metode ini penulis ajukan kepada manajer dan salah satu pegawai di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang juga para anggota (nasabah) mengenai implementasi fatwa tersebut dan pelaksanaan produk-produknya yang ada di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah sebuah cara untuk pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda, dan sebagainya. Serta bukti tertulis lainnya sesuai

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91

²⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm 180

permasalahan yang penulis teliti.²¹ Metode ini merupakan teknik utama yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai implementasi fatwa tersebut dan pelaksanaan produk-produk di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang yang meliputi latar belakang berdirinya dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena atau masalah yang diselidiki.²² Melalui metode observasi ini peneliti akan mengumpulkan data berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti dan sumber data yang penulis jumpai selama observasi berlangsung.

4. Metode Analisa Data

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka tehnik analisa data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif eksploratif.²³ Deskriptif eksploratif merupakan prosedur untuk menggambarkan suatu keadaan atas suatu fenomena²⁴ (menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya).

²¹ Sulistya Basuki, *Pengantar Dokumentasi Ilmiah*, Jakarta, Kesaint Balang, 1989, hlm. 1

²² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 60

²³ Muh. Nadzir, Ph.D, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Galia Indonesi, 1998, hlm. 108

²⁴ Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali, hlm. 314

Metode ini juga menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul dan bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang serta dalam hal ini penulis hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang diteliti.²⁵

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah yang dibahas sesuai judul skripsi ini. Dengan demikian, maka di dalamnya memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Menguraikan sekilas Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (struktur organisasi, fatwa-fatwa, tugas-tugas, dan wewenangnya), dan menguraikan tentang asuransi syari'ah,

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hlm. 195

serta menguraikan tentang metode istimbath yang dilakukan Dewan Syari'ah Nasional terhadap penetapan fatwa tersebut.

BAB III : Membahas tentang profil Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang, visi dan misi, dan membahas mengenai produk-produk Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang, serta menguraikan tentang implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.

BAB IV : Analisis terhadap implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia di Asuransi Syraiah Mubarakah Semarang dan analisis terhadap pelaksanaan produk-produk yang ada di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dari data yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya dan disertakan pula mengenai saran-saran, maka di akhir pembahasan ini penulis mengakhiri dengan penutup.

BAB II

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA

INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

A. Sekilas Dewan Syari'ah Nasional

Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Umat yang secara mayoritas ini akan menjadi kekuatan secara potensial bagi suksesnya pembangunan Negara kita. Pembangunan yang bersifat menyeluruh baik lahiriyah maupun batiniyah yang hakekatnya ditujukan kearah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya.

Sejak dahulu umat Islam senantiasa menganggap bahwa ulama merupakan pemimpin dan pewaris para Nabi, oleh karenanya pendapat-pendapat ulama, fatwa-fatwa, dan petunjuk-petunjuknya, serta sikap-sikapnya selalu diikuti dan ditaati oleh umat Islam dengan Segala keikhlasannya, bukan saja mengenai masalah ukhrawi tetapi juga masalah duniawi. Peranan ulama sebagai masyarakat yang tidak formal besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunannya yang sedang dilaksanakan pemerintah. Apabila antara ulama dan pemimpin atau pemerintah sudah sepaham dalam menyampaikan cita-cita pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat akan mudah dan melaksanakannya.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesi (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisien dan

koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar di peroleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada di lembaga keuangan masing-masing.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dewan syari'ah nasional akan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.¹ Struktur organisasi dewan syari'ah nasional terdiri dari pengurus pleno dan badan pelaksana harian. Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio ketua umum MUI dan sekretaris DSN-MUI dijabat Ex Officio sekretaris umum MUI. Adapun keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) diambil dari pengurus MUI, komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syari'ah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh rapat pleno DSN-MUI.²

Struktur kepengurusan dewan syari'ah nasional berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep.

¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional cet. I, Jakarta, 2001, hlm. 125

² www.mui.or.id

200/MUI/VI/2003 tentang pengembangan organisasi dan keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Periode Tahun 2000-2005 adalah :³

Ketua : K. H. M. A. Sahal Mahfudh
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab
Wakil Ketua : Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman
Wakil Ketua : K. H. Ma'ruf Amin
Sekretaris : Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
Wakil sekretaris : Drs. H. M. Ichwan Syam
Wakil sekretaris : Dra. Hj. Nilmayatti Yussri
Anggota : 1. Prof. K. H. Ali Yafie
2. KH. Drs. H. Tolchah Hasan
3. Prof. Dr. H. Said Agil Al Munawar, MA

Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional :

Ketua : K. H. Ma'ruf Amin
Wakil Ketua : Dr. H. M. Anwar Ibrahim
Sekrtetaris : Drs. H. M. Ichwan Syam
Wakil sekretaris : Drs. Hasanuddin, M.Ag
Bendahara : H. M. Syureich

Anggota (kelompok kerja/pokja) :

1. H. Cecep Maskanul Hakim, Mec
(Koordinator pokja Perbankan dan Pegadaian)
2. Prof. K. H. Ali Mustofa Ya'qub, MA
(Koordinator Pokja Asuransi dan Bisnis Syari'ah)

³ *Ibid*

3. Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA
(Koordinator Pokja Pasar Modal dan Program)

B. Kedudukan dan Tugas

Kedudukan, status dan anggota Dewan syari'ah Nasional

1. Dewan syari'ah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
2. Dewan Syari'ah Nasional Membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah.
3. Anggota Dewan syari'ah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar, dalam bidang yang terkait dengan mu'amalah syari'ah.
4. Anggota Dewan Syari'ah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia dengan masa bakti sama dengan masa bakti pengurus Majelis Ulama Indonesia 5 tahun.⁴

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bertugas :

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk-produk dan jasa keuangan syari'ah
4. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁵

Mekanisme kerja Dewan syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu :⁶

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 543

⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 231

1. Dewan Syari'ah Nasional

- a. Dewan Syari'ah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam 3 bulan atau bilamana diperlukan.
- b. Dewan syari'ah nasional mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional.
- c. Setiap tahunnya Dewan syari'ah Nasional membuat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syari'ah bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah Nasional.

2. Badan Pelaksana Harian

- a. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pernyataan mengenai sesuatu periode lembaga keuangan syari'ah. Usulan ataupun pernyataan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana harian.
- b. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan usulan.
- c. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan harus menyampaikan masalah kepada ketua.
- d. Fatwa atas memorandum Dewan syari'ah Nasional ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DSN.

⁶ www.mui.or.id

- e. Ketentuan Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno Dewan syari'ah Nasional untuk mendapatkan pengesahan.

Fungsi Dewan syari'ah Nasional adalah :⁷

1. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Dengan ini Dewan syari'ah Nasional diharapkan mempunyai peran secara produktif dalam menanggapi perkembangan ekonomi, khususnya ekonomi syari'ah yang semakin kompleks.
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.
3. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini lembaga yang diawasi adalah perbankan syari'ah, asuransi, reksadana, modal ventura dan lain sebagainya.

Berdasarkan surat keputusan Dewan syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PP DSN-MUI), Dewan Syari'ah Nasional mempunyai wewenang sebagai berikut :⁸

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing lembaga keuangan.

⁷ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 32

⁸ www.mui.or.id

2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan syari'ah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

C. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan Metode Istimbath Ulama DSN-MUI Dalam Menetapkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah

Berkaitan dengan permasalahan tentang asuransi khususnya pedoman umum asuransi syari'ah, maka Komisi Fatwa DSN setelah menimbang dan memperhatikan dari berbagai sudut pandang, Dewan Syari'ah

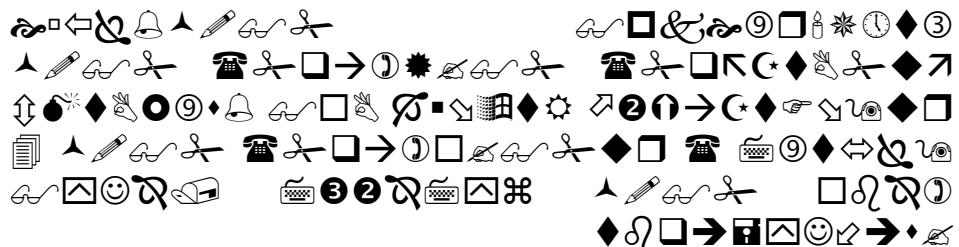
Nasional Majelis Ulama Indonesia menfatwakan pedoman umum asuransi No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

Pertimbangan yang dipakai Dewan syari'ah Nasional diantaranya adalah :

- a. Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya meng-antisipasi kemungkinan terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, maka perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
- b. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.
- c. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, apakah status hukum maupun cara aktifitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
- d. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.⁹

Kemudian Dewan syari'ah Nasional mengingat :

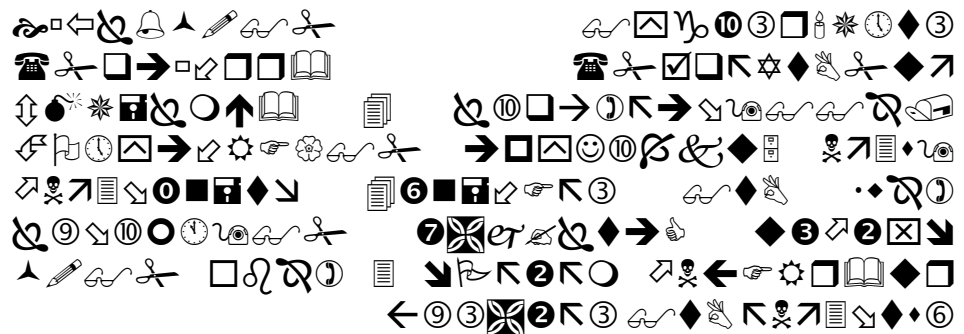
1. Firman Allah tentang perintah mempersiapkan hari depan :



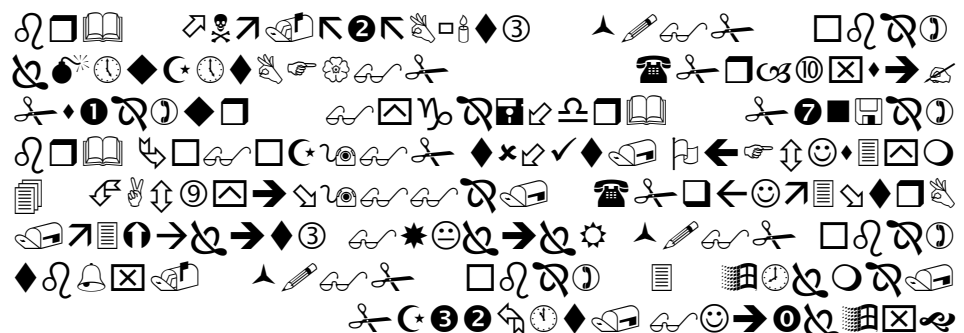
⁹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Jakarta, 2006, hlm. 123

“Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr [59]: 18).

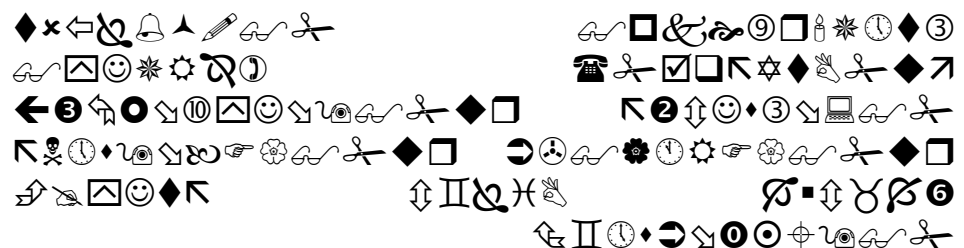
2. Firman Allah tentang prinsip-prinsip bermu'amalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain :

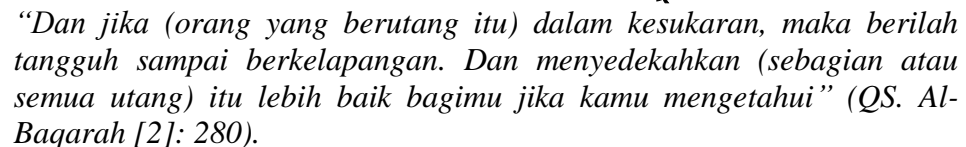
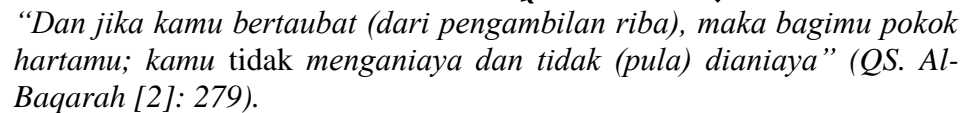
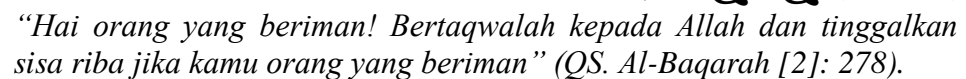
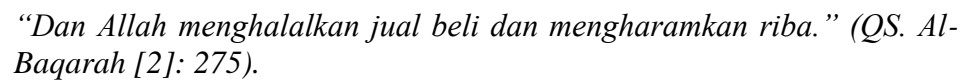
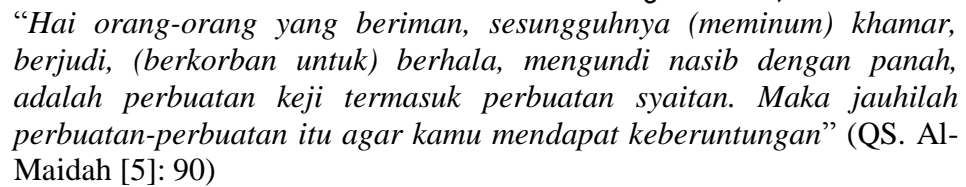


“Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkannya berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1).



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil...” (QS. An-Nisa [4]: 58).





“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..” (QS. An-Nisa [4]: 29)

3. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

7 ■ ✂ ◆ ▴
☎ ☰ 8 ◆ □ ▽ ① * 📶 🔌 ✂ ◆ □ ് 3 ⚙️ 📶 🔌 ✂
7 ■ ✂ ◆ ▴ ☎ ✂ □ ◀ ⚙️ ◆ □ 🔌 ➡ + ✂ ◆ □
📄 ↻ ⌚ ◆ □ ⇅ ⑨ ▴ ➡ 📶 🔌 ✂ ◆ □ ⚙️ 📶 🔌 * “ 🔌 ✂
□ ⌚ ് ① ☎ 🖋️ ✂ ☎ ✂ □ ➡ ⑩ □ ✂ 🔌 ✂ ◆ □
⚙️ 🔌 ✂ + ⑪ ് ➡ 📶 🔌 ✂ ◀ ⑨ ③ ് ⑨ ☒ 🖋️ ✂

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermu'amalah, anatara lain :

من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه (رواه مسلم)

“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

“Perumpamaan orang beriman dalam kasih _aying, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita” (HR. Muslim dan Nu'man bin Basyir).

المؤمن للمؤمن كلبنيان يشد بعضه بعضا (رواه مسلم عن ابي موسى)

“Seorang mu’min dengan mu’min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari).

والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى (رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ummar bin Khattab).

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (رواه مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة)

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

ان خيركم احسنكم قضاء (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت، ومالك عن يحيى)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).

5. Kaidah fiqih yang menegaskan :

الاصل في المعاملات الا باحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضرر يدفع بقدر الإمكان.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضرر يزال.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

Dewan Syari’ah Nasional juga memperhatikan :

1. Hasil Lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi’uts Tsani 1422 H / 4-5 Juli 2001 M.
2. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada Senin, tanggal 15 Muharram 1422 H / 09 April 2001 M.
3. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H / 17 Oktober 2001.

Setelah menimbang dan memperhatikan hal tersebut diatas, Dewan Syari’ah Nasional Memutuskan dan Menetapkan **FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH.**

1. Ketentuan Umum

Asuransi Syari’ah (Ta’min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang / pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah.

Akad yang sesuai dengan syari’ah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. Akad **tijarah** adalah semua bentuk akad yang dilakukan

untuk tujuan komersial. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan semua kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Akad dalam Asuransi

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad ***tijarah*** dan / atau akad ***tabarru'***. Akad ***tijarah*** yang dimaksud dalam ayat (1) adalah ***mudharabah***. Sedangkan akad ***tabarru'*** adalah ***hibah***.

Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- b. Cara dan waktu pembayaran premi;
- c. Jenis akad ***tijarah*** dan / atau akad ***tabarru'*** serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

3. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

Dalam akad ***tijarah (mudharabah)***, perusahaan bertindak sebagai ***mudharib*** (pengelola) dan peserta bertindak sebagai ***shahibul mal*** (pemegang polis). Dan dalam akad ***tabarru' (hibah)***, peserta memberikan

hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

4. Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*

Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad ***tabarru'*** bila pihak yang bertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban yang belum menunaikan kewajibannya. Sedangkan jenis akad ***tabarru'*** tidak dapat diubah menjadi jenis akad ***tijarah***.

5. Jenis Asuransi dan Akadnya

Dipandang dari segi jenisnya asuransi terdiri dari atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

6. Premi

Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur *riba* dalam penghitungannya.

Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Premi yang berasal dari jenis akad ***tabarru'*** dapat diinvestasikan.

7. Klaim

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

8. Investasi

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul, dan Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

9. Reasuransi

Bahwasannya asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syaria'h.

10. Pengelolaan

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*). Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*).

Adapun implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Dan jika salah satu pihak ada yang tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹¹

2. Metode Istimbath DSN-MUI Dalam Menetapkan Fatwa No. 21?DSN-MUI/X/2001

Metode istimbath yang digunakan oleh para ulama DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tersebut adalah :

A. Al-Qur'an

Secara eksplisit tidak satu ayat pun dalam al-Qur'an yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah "al-ta'min" atau "al-takaful". Akan tetapi dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Mengenai ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat macam kategori, yaitu¹²:

¹¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Jakarta, 2006, hlm. 123-135.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008, hlm. 29

1. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan, sebagai mana yang terdapat dalam;
 - a). Surat Al-Hasyr, Ayat 18
 - b). Surat Yusuf, Ayat 47-49
2. Perintah Allah untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama
 - a). Surat Al-Maidah, Ayat 2
 - b). Surat Al-Baqarah, Ayat 185.¹³
3. Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan
 - a). Surat Al-Quraisy, Ayat 4
 - b). Surat Al-Baqarah, Ayat 126
4. Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha
 - a). Surat Al-Taghaabun, Ayat 11
 - b). Surat Luqman, Ayat 34
5. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 261.¹⁴

B. Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Hadis tentang *Aqilah*

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: “*Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa*

¹³ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 236-237

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hlm. 30-31

tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)

Hadis di atas *menjelaskan* tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadis di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah-nya* merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.¹⁵

2. Hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad bersabda: *“Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.”*

3. Hadis tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah SAW: *“Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (HR. Bukhari)*

4. Hadis tentang mengurus harta anak yatim

¹⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, 2004, hlm. 114-115.

Diriwayatkan dari *Sabal* bin Sa'ad r.a, mengatakan Rasulullah telah bersabda: *"Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti akan di surga seperti ini."* Rasulullah bersabda sambil menunjukkan jari jari telunjuk dan jari tengah. (HR. Bukhari)

5. Hadis tentang menghindari risiko

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang (untanya): *"Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?"* Bersabda Rasulullah SAW: *"Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT."* (HR. At-Turmudzi)

6. Hadis tentang Piagam Madinah

Dalam piagam madinah dijelaskan tentang peraturan bersama antara orang quraisy yang berhijrah (migran) dengan suku-suku yang tinggal di Madinah untuk saling melindungi dan hidup bersama dalam suasana kerja sama dan tolong-menolong. Pasal 11 piagam Madinah memuat ketentuan bahwa kaum mukminin tidak boleh membiarkan sesama mukmin berada dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar *diyat* atau tebusan tawanan seperti disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu. Ketentuan ini menekankan solidaritas sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan.¹⁶

C. Ijtihad

1. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata: *"Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus*

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

*menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.” Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.*¹⁷

2. Ijma’

Para sahabat telah melakukan *ittifak* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijmak atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuaran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak keluarga laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayaran karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan adanya sahabat yang menentang Khalifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah tedapat ijmak di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.¹⁸

3. Qiyas

Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah atau al-Hadis dengan hal lain yang

¹⁷ AM. Hasan Ali, Op.Cit., hlm. 122.

¹⁸ Wirdyaningsih, *Op.Cit.*, hlm. 242.

hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau Hadis karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan). Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan bahwa dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat diqiyaskan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah.

4. Istihsan

Istihsan adalah cara untuk menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli ushul fikih adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat menggantikan atau menghindari balas dendam yang berkelanjutan.¹⁹

D. Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah dikenal juga dengan nama *Takaful* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Sedangkan dalam pengertian muamalah berarti saling memikul resiko di antara sesama orang

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 34.

sehingga antara yang satu dan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Hal itu dikenal dengan sistem *sharing of risk*. Sistem yang dijalankan dalam asuransi syari'ah ini didasarkan atas azas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana *ibdah*, sumbangan, dan derma yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Pengertian takaful dalam muamalah didasarkan pada tiga prinsip dasar, diantaranya adalah :

1. Saling bertanggung jawab,
2. Saling bekerja sama dan saling membantu
3. Saling melindungi.²⁰

Takaful yang berarti saling menanggung antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar pijakan tersebut, diantara peserta bersepakan menanggung bersama di antara mereka atas resiko yang diakibatkan oleh kematian, kebakaran, kehilangan, dan sebagainya. Dengan demikian, system asuransi syari'ah harus bersifat universal, berlaku secara umum.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syari'ah, asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Asuransi syari'ah bersifat

²⁰ Muhammad Syakir Sula, Op.Cit., hlm 32-34.

saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah “*ta’awun*”, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara anggota sesama peserta asuransi syari’ah dalam menghadapi malapetaka.

Pada asuransi syari’ah premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru*. Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapat alokasi bagi hasil (*al-mudharabah*). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sementara itu, *tabarru* merupakan infak atau sumbangan peserta yang berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life insurance* atau *general insurance*). Hal itu sejalan dengan perintah Allah SWT dalam surat al-Baqarah 261 dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nasai, Hakim, dan Baihaqi.

“*Saling memberi hadiahlah, kemudian saling mengasihi*”.

Asuransi syari’ah mengemban misi dan visi yang wajib dilaksanakan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan asuransi syari’ah khususnya dan kegiatan lembaga keuangan syariah lainnya.

Adapun visi dan misi asuransi syari’ah, diantaranya adalah :

1. Misi Aqidah
2. Misi Ibadah (ta’awun)

3. Misi Ikhtishodi “ekonomi”

4. Misi Keumatan.²¹

²¹ Abdullah Amrin, Op.cit., hlm 3-5.

BAB III
IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI
DI ASURANSI SYARI'AH MUBARAKAH CABANG SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya Asuransi Syari'ah Mubarakah (ASM)

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syari'ah, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syari'ah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syariah baik di kota besar maupun di berbagai pelosok daerah. Masyarakat saat ini telah menyadari betapa perlunya lembaga keuangan syari'ah, khususnya asuransi syari'ah, untuk memenuhi transaksi keuangan yang biasa mereka lakukan.

PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah (ASM) didirikan oleh H. Emil Abbas, MBA, PhD pada tanggal 18 Oktober 1993 di Balikpapan berdasarkan akta Notaris Muhammad Rasyid Umar, S.H. resmi beroperasi dengan sistem syari'ah penuh pada tanggal 3 Mei 2001 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-01410HT.01.04. Th 2001 tanggal 31 Mei 2001.¹

Asuransi syari'ah mubarakah saat ini memiliki 36 kantor pemasaran di pulau-pulau utama meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Asuransi Syari'ah Mubarakah merupakan Perusahaan Asuransi Terbaik kedua pada tahun 2001 untuk kategori Perusahaan Asuransi yang mempunyai asset sampai dengan

¹ Lihat Profil Asuransi syari'ah Mubarakah.

Rp. 1 Trilyun.² Asuransi Syari'ah Mubarakah memiliki kerjasama strategis dalam bidang asuransi dengan : Instansi Pemerintah, Perbankan, Lembaga Pendidikan, Ormas, dan lain-lain.

Asuransi Syari'ah Mubarakah adalah salah satu sister company EASCO GROUP; Perusahaan Nasional dengan beberapa anak perusahaan di Indonesia maupun luar negeri. Kesatuan ini memberikan gambaran yang kuat terhadap dukungan teknis dan permodalan serta rasa aman berinvestasi bagi “ummat”.

Dengan adanya Peraturan Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06.2003, Asuransi Syari'ah Mubarakah menerapkan skema kebijakan investasi dalam segala bidang seperti keuangan, agrobisnis, industri, dan jasa distribusi. Asuransi Syari'ah Mubarakah berkonsentrasi terhadap investasi pada produk-produk Pembiayaan Barang (Murabahah), Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah) dan Instrumen Keuangan Syari'ah seperti Obligasi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, dan lain-lain.

Asuransi Syari'ah Mubarakah juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk bermitra dengan perusahaan lain memberikan bantuan dalam pengelolaan asset mereka didasarkan pada prinsip-prinsip islami dengan hasil yang optimum. Asuransi Syari'ah Mubarakah juga berharap skema dari kebijakan ini dapat menciptakan perekonomian yang sehat di Indonesia.

² Majalah Investor No. 59 Edisi Juli 2002.

1. Legalitas dan Pengelola Asuransi Syari'ah Mubarakah

Asuransi Syari'ah Mubarakah telah sah dalam menjalankan operasinya sesuai dengan Badan Hukum yang berlaku diantaranya adalah :

- a. Akte Notaris No. 111 Tanggal 18 Oktober 1993. Notaris Muhammad Rasyid Umar, SH.
- b. SK. Dep. Kehakiman RI No. C2.7227HT.01.01 Tanggal 5 Mei 1994.
- c. SK. Dep. Keuangan RI No. 570/KMK.017/1997 Tanggal 13 November 1997.
- d. Akte Perubahan No. 3 Tanggal 3 Mei 2001 Notaris Chairul Bachtiar, SH, MM.
- e. SK. Dep. Kehakiman dan HAM RI No. C-01410 HT.01.04. TH. 2001 Tanggal Mei 2001.
- f. Akte Perubahan No. 3 Tanggal 6 Desember 2001 Notaris Chairul Bachtiar, SH, MM.
- g. Akte Perubahan No. 10 Tanggal 25 April 2002 Notaris Chairul Bachtiar, SH, MM.
- h. Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah No. 14 Tanggal 26 Agustus 2005 Notaris Ina Rosiana, SH.

2. Profil Perusahaan

Nama : PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah

Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4 Jakarta
12950
Telephon : (62-21) 522 8145
Fax : (62-21) 522 8830
Website : www.mubarakah.com
Tanggal beroperasi : 18 Oktober 1993
Jumlah kantor : 36 kantor cabang

3. Struktur Organisasi Asuransi Syari'ah Mubarakah

Agar organisasi yang dikelola berjalan dengan lancar, maka harus ada tingkat kemampuan yang tinggi dalam mengelola administrasi dan manajemen keuangan, selain itu harus ada kerjasama yang baik antara organisasi yang bekerja diperusahaan tersebut antara lain :

i. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : H. Emil Abbas, MBA.
- Komisaris Independen : Drs. Karsono Surjowibowo
- Komisaris : Rinaldi, S.Si, MM

j. Dewan Direksi

- Direktur : Jafril Khalil, MCL., PhD., FIIS
- Wakil Direktur : Ferdinal, SE., M.Sc., Ak
- Wakil Direktur : Ir. Burhanudin Hulaimi

k. Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, MA

- Anggota : Ali Rahmat
- Anggota : Dr. H. Ibdalsyah, MA

4. Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang

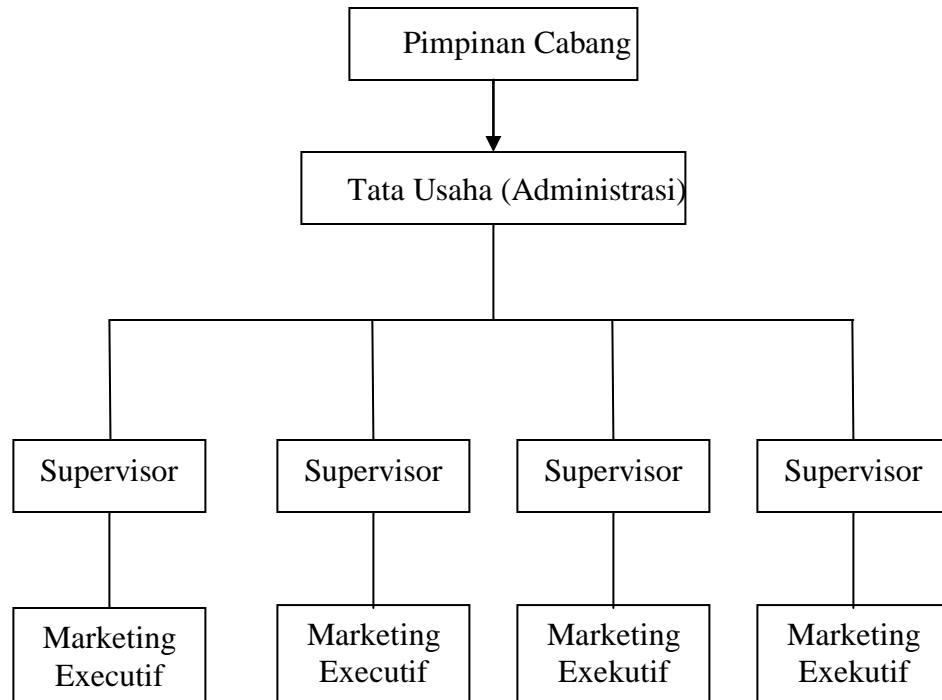
Untuk kantor cabang Semarang dipilih seorang agen asuransi dari kantor pusat yang ada di Jakarta, beliau adalah bapak Imam Supardi selaku Branch Manajer. Dengan jerih payahnya dan semangat yang besar beliau mempromosikan dan memperkenalkan Asuransi Syari'ah Mubarakah kepada masyarakat Semarang. Karena antusias dari masyarakat yang ingin menjadi peserta Asuransi Syari'ah Mubarakah semakin banyak dan prospek di Semarang semakin baik dengan melihat semakin bertambahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota asuransi. Akhirnya dengan alasan tersebut, Bapak Imam mengusulkan ke pihak asuransi pusat yang berada di Jakarta untuk membuka cabang di Semarang.³

Dengan berlandaskan konsep penentuan daerah yang mempunyai potensi bisnis bagi pembukaan kantor cabang Asuransi Syari'ah Mubarakah. Kota Semarang merupakan salah satu alternatif lokasi kantor cabang yang memiliki prospek bisnis dimasa depan. Maka pada tahun 2007 untuk pertama kali dibukalah Asuransi Syari'ah Semarang di Jalan Ronggolawe yang kemudian pindah di jalan Gajahmada Blok C No. 9 E Plaza Semarang Telp. (024) 8311066, fak. (024) 8311063.

³ Hasil wawancara dengan *Imron* pada tanggal 21 Maret 2008

Adapun bagan organisasi Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang adalah sebagai berikut :

Bagan Organisasi Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang



Sumber : Wawancara dengan Asuransi Syariah Mubarakah Semarang

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada bagan di atas adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang

- Mengawasi langsung pada bagian dibawahnya, pengawasan dilakukan dengan tujuan mencapai keberhasilan kinerja kelancaran dan ketertiban perusahaan.

b. Supervisor

- Bertugas memasarkan Produk takaful baik dengan cara mendatangi calon nasabah langsung, melalui brosur maupun dengan cara lainnya
- Menangani pemasaran

c. Administrasi atau Tata Usaha

- Menyusun data keuangan yang diberikan oleh kepala cabang
- Membuat daftar gaji karyawan
- Mengadakan kalkulasi dan penyusunan neraca
- Melakukan pembayaran gaji kepada karyawan
- Memberikan bonus pada bagian marketing

d. Marketing Executif

- Bertanggung jawab atas pemasaran produk asuransi

Berikut ini penulis sertakan nama personil Asuransi Syariah

Mubarakah Semarang :

Pimpinan Cabang : Imam Supardi

Marketing Executif : Zamroni

Administrasi atau Tata Usaha : Siti Yuliana

Supervisor : Imron, Adam Mahmudi, Hari⁴

⁴ *Ibid.*

B. Visi dan Misi Asuransi Syari'ah Mubarakah

Visi dan Misi Asuransi Syari'ah Mubarakah (ASM) adalah sebagai berikut :

- Visi : “ *Baladatun Thoyyiban Warabbun Ghafur* “ (QS. 34 : 15)
Membawa Umat menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan di bawah perlindungan Allah SWT.
- Misi : “ Menjadi perusahaan asuransi syari'ah nasional yang paling efisien dan paling aman serta terpercaya di Indonesia sehingga kami mampu memberikan manfaat yang berarti dan perlindungan yang paling aman kepada setiap pemakai jasa keuangan kami.”
- Budaya Asuransi Syari'ah Mubarakah adalah Ekonomi syari'ah memberikan batasan kepada kita untuk membedakan dengan jelas dan terang antara yang hak dan yang bathil, yang hitam dan yang putih, yang halal dan yang haram. Konsep “*Dari Ummat*” adalah menginvestasikan kembali, dengan tujuan untuk mengangkat ekonomi lebih baik dengan investasi yang menguntungkan dan perlindungan keuangan terhadap sesama.

Langkah *pertama* adalah menghimpun, *kedua* adalah menginvestasikan dengan tujuan mencapai kemakmuran dan keamanan. Bangsa dan Negara ini dicintai oleh rakyatnya sendiri. Itulah sebabnya ASM akan membantu kepada mereka yang percaya terhadap masa depannya.

C. Produk-produk Asuransi Syari'ah Mubarakah

Produk-produk asuransi syari'ah berbeda dengan produk asuransi konvensional. dalam hal menentukan premi, pemberian klaim, dan penentuan hasil usaha, pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga sedangkan pada asuransi syariah mubarakah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Berikut adalah produk-produk Asuransi Syariah Mubarakah :

1. Syamila Mubarakah

Produk ini merupakan produk asuransi syari'ah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta dan keluarganya dimasa yang akan datang yang sudah direncanakan sejak saat ini seperti : biaya pendidikan, Haji/Umrah, Qurban/Aqiqah, tabungan anak nikah, membeli rumah/kendaraan/lahan pertanian dan pembibitan. Niat dan keinginan peserta juga diproteksi dengan asuransi kematian dimana bila peserta meninggal dunia maka kepada ahli waris akan diberikan santunan sejumlah manfaat Ta'awun.

Premi unsur tabungan/investasi akadnya dengan perusahaan adalah wadiah yad-dhamanah, sedangkan premi unsur Ta'awun akadnya adalah wakalah. Biaya-biaya yang dibebankan kepada para peserta adalah :

- Tahun pertama polis sebesar 40% premi
- Tahun kedua polis sebesar 20% premi
- Tahun ketiga polis dan seterusnya sebesar 3% premi.

Dalam hal pembagian keuntungan, perusahaan akan memberikan bonus berupa bagi hasil dari keuntungan/hasil investasi dengan nisbah 60% untuk peserta.⁵

2. *Investa Mubarakah*

Produk ini merupakan produk asuransi syari'ah yang dirancang khusus bagi peserta yang ingin menginvestasikan dananya untuk berbagai keperluan dimasa yang akan datang, seperti dana hari tua, dana pemeliharaan kesehatan masa pension, juga dapat dipersiapkan sebagai dana warisan untuk anak-anak tercinta.

Premi yang disetor peserta, terdiri atas wadiah/tabungan, iuran ta'awun dan biaya distribusi dan administrasi. Premi yang dibayarkan secara tunggal (sekaligus) dan tambahan premi dapat dilakukan secara bebas sesuai dengan ketentuan berikut :

- Premi Tunggal Minimum

Polis rupiah : Rp. 5.000.000 (dapat dibayar sekaligus atau berkala dalam 1 tahun. Polis US Dollar : USD 3.000,-

- Premi Tambahan Minimum

Polis rupaiah : Rp. 1.000.000,-

Polis US Dollar : USD 200,-⁶

⁵ Lihat Jurnal PT. Asuransi *Syari'ah* Mubarakah dalam Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan "2008".

⁶ Lihat Brosur Produk Asuransi Syari'ah Mubarakah "Investa Mubarakah".

Premi unsur tabungan/investasi akadnya dengan perusahaan adalah *wadi'ah yad-dhamanah*, sedangkan premi unsur ta'awun akadnya adalah wakalah. Pembagian keuntungan perusahaan akan memberikan bonus berupa bagi hasil dari keuntungan atau hasil investasi dengan nisbah 60% untuk peserta. Biaya pemutusan akad sebelum polis berusia 1 tahun sebesar 1% untuk mata uang rupiah atau 0.5% untuk mata uang US Dollar.

3. *An-Nama' Mubarakah*

Produk ini bertujuan sebagai dana simpanan peserta dengan harapan hasil investasi yang tinggi, disamping itu peserta dilindungi dengan asuransi kecelakaan berupa meninggal dunia dan cacat tetap.

Cara pembayaran premi (Nominal Polis) adalah tunggal, sedangkan cara pembayaran iuran ta'awun adalah tahunan dengan diambil langsung dari Nilai Tunai. Premi unsur tabungan/investasi akadnya dengan perusahaan adalah *wadi'ah yad-dhamanah*, sedangkan premi unsur ta'awun akadnya adalah *wakalah*.

Perusahaan akan memberikan bonus berupa bagi hasil dari keuntungan atau hasil investasi dengan nisbah 60% untuk peserta.⁷

4. *Sehat Mubarakah*

Produk ini bertujuan memelihara kesehatan peserta beserta keluarganya berupa penggantian biaya perawatan atau pengobatan bila peserta

⁷ Lihat Brosur Produk *Asuransi* Syari'ah Mubarakah "An-Nama' Mubarakah"..

di rawat inap di rumah sakit. Akad premi antara peserta dengan perusahaan adalah wakalah karena seluruh premi adalah ta'awun.⁸

5. *Ta'awun al-Khairat Lith Thulab*

Progam Ta'awun al-Khairat Lith Thulab adalah progam asuransi yang secara khusus memberikan perlindungan berupa santunan meninggal dunia kepada ahli waris peserta asuransi apabila peserta tersebut meninggal dunia dan manfaat ta'awun kecelakaan kepada siswa/siswi beserta para guru dan karyawan yang bekerja di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan manfaat ta'awun kecelakaan terdiri dari santunan meninggal dunia, cacat tetap total/sebagian dan santunan rawat inap di rumah sakit sebagai kaibat peserta mengalami kecelakaan.

Premi asuransi (iuran ta'awun) adalah sejumlah uang yang dikumpulkan dari peserta yang secara sukarela dan tidak untuk diminta kembali, ditujukan untuk secara bersama-sama, memberikan santunan meninggal dunia dan manfaat ta'awun kecelakaan. Oleh karena premi (iuran ta'awun) asuransi ini kecil maka pelayanan tambahan dapat diberikan kepada siswa/siswi beserta para guru dan karyawan yang bekerja di lingkungan lembaga pendidikan berupa Asuransi Ta'awun Lith Thulab.

Mengenai keanggotaan asuransi ini adalah siswa/siswi (TK sampai dengan mahasiswa) dan umum (karyawan yang berada di lingkungan sekolah tersebut seperti guru, tata usaha dan sebagainya).

⁸ *Op., Cit.*

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1. Identitas diri (KTP, SIM)
2. Mengisi aplikasi yang sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi
3. Membayar premi

Seseorang yang telah mendaftarkan dirinya dan telah memenuhi persyaratan tersebut maka secara otomatis orang tersebut sudah menjadi anggota atau peserta asuransi, dan berkewajiban membayar premi sekaligus pada saat kontrak asuransi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per peserta untuk siswa/siswi dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta untuk umum. Sedangkan masa asuransi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah 1 (satu) tahun pertama berakhir dengan mengajukan surat permintaan perpanjangan asuransi.

Adapun manfaat dari Ta'awun al-Khairat Lith Thulab adalah :

1. Apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada ahli waris yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada ahli waris yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
3. Apabila peserta mengalami cacat tetap total/sebagian akibat kecelakaan dalam masa asuransi, dibayarkan santunan secara

proporsional sesuai table berikut, maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

a. Cacat tetap seluruhnya

Kehilangan fungsi atas : kedua tangan; kedua kaki; kedua mata; satu tangan dan satu kaki; satu tangan dan satu mata; satu kaki dan satu mata; Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

b. Cacat tetap sebagian

kehilangan fungsi atas :

lengan kanan mulai dari bahu	:	70% x Rp. 2.000.000,-
lengan kiri mulai dari bahu	:	56% x Rp. 2.000.000,-
tangan kanan mulai dari siku	:	65% x Rp. 2.000.000,-
tangan kiri mulai dari siku	:	52% x Rp. 2.000.000,-
tangan kanan mulai dari pergelangan	:	60% x Rp. 2.000.000,-
tangan kiri mulai dari pergelangan	:	50% x Rp. 2.000.000,-
satu kaki	:	50% x Rp. 2.000.000,-
satu mata	:	30% x Rp. 2.000.000,-
jari jempol kanan	:	25% x Rp. 2.000.000,-
jari jempol kiri	:	20% x Rp. 2.000.000,-
jari telunjuk kanan	:	15% x Rp. 2.000.000,-
jari telunjuk kiri	:	12% x Rp. 2.000.000,-
jari kelingking kanan	:	12% x Rp. 2.000.000,-
jari kelingking kiri	:	7% x Rp. 2.000.000,-

jari tengah atau jari manis kanan : 10% x Rp. 2.000.000,-
jari tengah atau jari manis kiri : 8% x Rp. 2.000.000,-
satu jari kaki : 5% x Rp. 2.000.000,-

Peraturan diatas, bagi mereka yang kidal, maka perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.

4. Apabila peserta dirawat jalan akibat kecelakaan dalam masa asuransi, diberikan penggantian biaya perawatan sebesar kwitansi maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Berikut penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa peserta atau nasabah Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang Semarang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui dan mendorong masyarakat atau nasabah asuransi memilih Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang Semarang dibandingkan dengan lembaga asuransi lainnya.

Peserta Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang Semarang ;

1. Bapak Rosadi Subandriyo

Menurut beliau Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang Semarang merupakan salah satu instansi asuransi syari’ah yang ada di Semarang yang dalam kinerjanya sesuai dengan sistem syari’ah dan dapat menegakkan ekonomi Islam serta produk-produk yang ada di Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang Semarang sesuai dengan kebutuhan saya. Dan yang saya tahu mengenai penerapan fatwa yang berkenaan dengan asuransi syari’ah serta prinsip-prinsip asuransi syari’ah di Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang

Semarang masih belum sempurna atau masih dalam tahap penyempurnaan, mengingat Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang masih dikategorikan perusahaan baru.⁹

2. Bapak Muh. Salimi

Menurut bapak salimi faktor yang mendorong saya untuk bekerja sama dengan Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam berasuransi adalah karena saya tertarik dan percaya pada perusahaan Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dengan ke syari'ahannya, yang insya Allah jauh dari *riba*, *maisir*, *gharar*. Karena di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang mempunyai fungsi menetralsir dana-dana premi yang terkumpul ke investasi syari'ah. Selain saya berasuransi saya juga bisa menabung dari uang premi yang saya bayar setiap periodenya dan bagi saya yang terpenting adalah berasuransi halal dan bermanfaat bagi keluarga saya.¹⁰

D. Implementasi Fatwa DSN-MUI Di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang

Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *maisir*, *riba*, *bathil*, dan *ryswah* karena secara faktual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

⁹ Wawancara dengan bapak Rosadi Subandriyo (Peserta Asuransi) pada tanggal 01 Agustus 2008.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Muh. Salimi (peserta asuransi) pada tanggal 04 Agustus 2008.

Akan tetapi Islam pun tidak mengabaikan akan arti pentingnya lembaga keuangan yang memang mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya di muka bumi ini, termasuk di dalamnya kebolehan untuk melaksanakan kegiatan di bidang perasuransian.¹¹

Asuransi Syari'ah Mubarakah menilai bahwa asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari resiko kerugian yang mungkin timbul.
2. Menciptakan efisiensi perusahaan (*bussines efficiency*).
3. Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi.
4. Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the business*.¹²
5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.
6. Sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.¹³

Berdasarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syari'ah dalam ketentuan umum, Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam kinerjanya menerapkan prinsip saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang (nasabahnya) melalui asset dan akad tabarru' dalam memberikan

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008, hlm. 21

¹² H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 13

¹³ Sigit Triandari & Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, Salemba Empat, 2006, hlm. 178

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan. Tentunya akad tersebut harus sesuai dengan syari'ah bukan semata untuk tujuan komersial.¹⁴

Adapun ketentuan mengenai akad dalam Asuransi Syari'ah Mubarakah bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dan dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan, hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Sedangkan dalam akad *tijarah (mudharabah)*, Asuransi Syari'ah Mubarakah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta (nasabah) bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Oleh karena itu keraguan umat Islam untuk mengikuti program asuransi (khususnya pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang) dengan diintrodusirnya akad-akad tradisional Islam dalam polis asuransi oleh perusahaan Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang hendaknya tidak ada lagi. Karena dalam hal ini Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang telah

¹⁴ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Jakarta, 2006, hlm. 131

mengimplementasikan akad-akad tradisional Islam dalam kegiatan usaha perasuransianya, di antaranya yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.

Selain berpedoman pada fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang juga menerapkan prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari'ah dan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang merupakan turunan dari asuransi syari'ah dan konsep ekonomika islami. Biasanya literatur ekonomika islami selalu melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya, seperti lembaga perbankan dan asuransi.¹⁵

Bahwasannya Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar pada kinerja yang dilakukannya menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip dasar asuransi syari'ah.

Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu,;

1. Prinsip Ketakwaan (*Tauhid*).
2. Prinsip Keadilan (*Justice*)
3. Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*)
4. Prinsip Kerja sama (*Cooperation*)
5. Amanah (trustworthy/*al-amanah*)

¹⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam*, Jakarta Prenada Media, 2004, hlm. 125.

6. Prinsip Larangan Riba
7. Prinsip Larangan Maisyir (*Judi*)
8. Prinsip Larangan Gharar (*Ketidakpastian*)¹⁶

Implementasi dari fatwa diatas harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Oleh karena itu dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang yang bertugas memberi rekomendasi atas fatwa terhadap produk-produk yang akan diluncurkan kepada masyarakat serta memberi fatwa terhadap investasi yang akan ditempatkan oleh pihak asuransi ini. Sehingga investasi yang dilakukan oleh Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang benar-benar mengacu pada sistem syari'ah atau sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Iman Supardi, Branch Manager *Asuransi Syari'ah Mubarakah Semarang* Tanggal 14 April 2008.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA
NO. 21/DSN-MUI/X/2001
TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH

A. Analisis Terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI Di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang

Setelah penulis meneliti sebenarnya apakah pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang telah merealisasikan dan menerapkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dalam kinerjanya atau hanya sebatas “*omong kosong*” belaka, yang akan menyesatkan dan menjadi “*topeng*” bagi perekonomian Islami pada masyarakat khususnya bagi umat Islam yang menginginkan berasuransi yang aman, dimana hal tersebut bertujuan menjaga keamanan bagi keluarga, hartanya dan sekaligus menginvestasikan dananya (peserta atau nasabah) pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang.

Dalam menjalankan usahanya secara syari'ah, Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang

ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi secara syari'ah.

Oleh karena itu keraguan umat Islam untuk mengikuti program asuransi dengan diintrodusirnya akad-akad tradisional Islam dalam polis asuransi oleh perusahaan Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang hendaknya tidak ada lagi. Karena dalam hal ini Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang telah mengimplementasikan akad-akad tradisional Islam dalam kegiatan usaha perasuransianya, di antaranya yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.¹

Selain berpedoman pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam kinerjanya juga menggunakan prinsip sebagaimana yang ada dalam asuransi syari'ah (prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islami). Adapun diantara prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip saling bertanggung jawab, prinsip saling bekerja sama atau saling bantu membantu dan prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain.²

1. Prinsip Ketakwaan (*Tauhid*)

Pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang prinsip *tauhid* ini merupakan dasar utama dalam kegiatan usaha

¹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 254

² M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 139-140

perasuransia dimana dalam setiap gerak langkahnya harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Salah satunya ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang diikuti oleh setiap pegawai dan manajer perusahaan asuransi syari'ah tersebut, yang mana pada setiap bulannya ada kegiatan yang berorientasi untuk mempererat tali silaturahmi. Meskipun ini kegiatan intern perusahaan tetapi kegiatan ini merupakan wadah bagi para anggota perusahaan Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang khususnya dan para pelaku ekonomi umumnya untuk lebih mendekatkan diri Kepada Khaliq-Nya. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh perusahaan asuransi syariah di Semarang dan perusahaan Islam lainnya, selain mempunyai misi *Habblumminallah* (Hubungan dengan Allah) dan juga *Habblumminannas* (Hubungan dengan Manusia) dengan maksud mencari masukan dan kritikan pihak lain, untuk kemajuan dan kesuksesan perusahaan lain.³

2. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Pada prinsip kedua ini asuransi syari'ah menempatkan kata keadilan direalisasikan pada hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Juga pada pembagian profit yang dihasilkan dari hasil pengelolaan sesuai dengan akad yang telah disetujui diawal perjanjian. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang membedakan dengan asuransi konvensional, karena dengan

³ Wawancara dengan Bapak Iman Supardi, Branch Manager Asuransi Syari'ah Mubarakah Semarang Tanggal 14 April 2008.

adanya prinsip keadilan pembagian profit sharing pada saving yang terkumpul dari dana premi yang akan di bagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan awal.

3. Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syari'ah adalah prinsip tolong menolong (*ta'awun*), begitu juga pada perusahaan Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang, dimana prinsip tolong menolong (*ta'awun*) ini merupakan bentuk solusi bagi mekanisme operasionalnya, seseorang yang masuk asuransi syari'ah sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Hal ini sesuai dengan hadits "*Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti satu tubuh (jasad) apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh*".⁴

4. Prinsip Kerja sama (*Cooperation*)

Berpegang dari sifat manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi yang mana hanya dengan mewujudkan kerja sama antar sesama

⁴ *Ibid.*

manusia, maka barulah merelisasikan kedudukannya sebagai mahluk sosial.

Pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang, kerja sama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi ini memakai konsep *mudharabah*. karena pada dasarnya konsep *mudharabah* adalah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.⁵

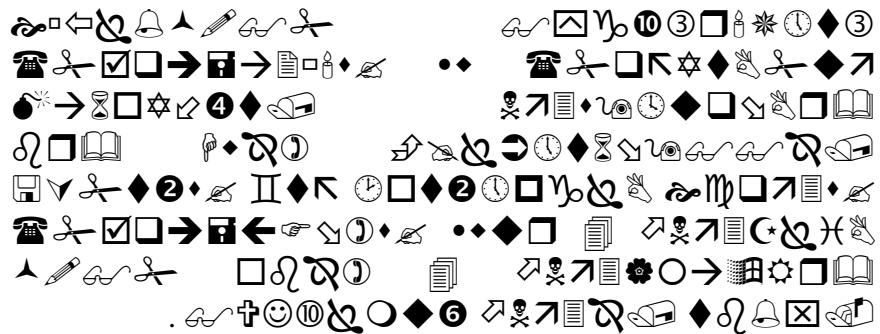
5. Amanah (*trustworthy/al-amanah*)

Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam mengimplementasikan prinsip amanah ini melalui nilai-nilai akuntabilitas, dimana perusahaan ini melalui penyajian laporan keuangan setiap periode tercatat secara rapi. Dalam hal ini Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para nasabah atau peserta asuransi untuk mengakses laporan keuangan perusahaan asuransi ini. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi ini mengusahakan dengan sebenar-benarnya dan penuh kebenaran serta keadilan dalam bermuamalah.

⁵ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 140

6. Prinsip Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS.an-Nisa' [4]: 29)

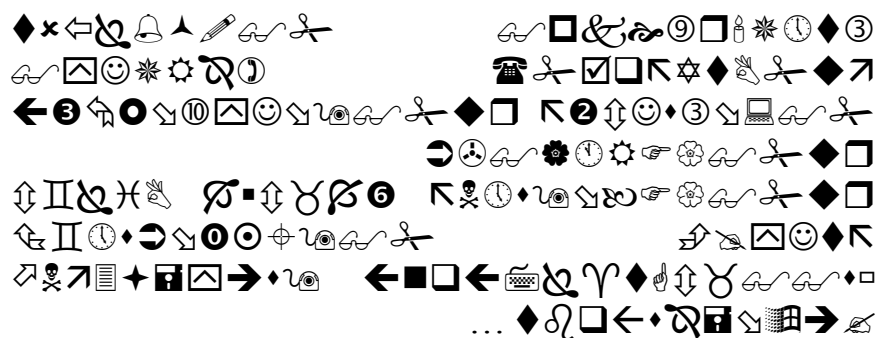
Salah satu tujuan didirikannya Asuransi Syari'ah Mubarakah adalah dalam rangka menghindari praktek riba yang ada dalam asuransi konvensional, dimana asuransi konvensional dalam menginvestasikan dananya dengan menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian asuransi konvensional sangat sulit untuk menghindari praktek riba, pada hal Islam riba sangat dilarang dan haram hukumnya.

Dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) semua premi yang terkumpul dari peserta dikelola atau diinvestasikan sesuai dengan hukum syar'i yaitu menjauhi haram dan dalam pembagian keuntungan peserta bukan berdasarkan bunga, namun dari pendapatan perusahaan atas hasil investasi atau pengelolaan

premi tersebut sehingga pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang benar-benar bebas dari bunga.

7. Prinsip Larangan Maisyir (*Judi*)

Allah SWT. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisyir (*Judi*): Firman Allah dalam QS al-Maidah [5]: 90



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [5]: 90)⁶

Untung-untungan merupakan salah satu perbuatan yang tidak dibolehkan dalam aktivitas ekonomi Islam. Unsur *maisir* dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota, jumlah premi yang disetor sedikit) akan menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih

⁶ Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dalam praktik, Jakarta, Gema Insani, 2006, hlm. 26

besar atau apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* biasanya pada tahun ketiga maka yang bersangkutan (peserta asuransi tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, dalam hal ini peserta asuransi pada posisi rugi, juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh under writting dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Lain halnya konsep di Asuransi Syari'ah Mubarakah, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta asuransi maka ia berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*(derma).⁷

8. Prinsip Larangan Gharar (*Ketidakpastian*)

Rasulullah SAW. bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار.

Artinya: "Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW. melarang jual beli hashah dan jual beli gharar."⁸

Ketidakpastian atau *gharar* tercermin dalam bentuk akad dan sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i menerima uang klaim itu sendiri, hal ini dikemukakan oleh bapak

⁷ Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm. 258

⁸ AM. Hasan Ali, Ibid., hlm. 135

Imam selaku Branch manajer di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang. Bentuk akad asuransi konvensional kontrak atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad *tabadulli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan, dimana akad pertukaran haruslah diketahui berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini yang akan menimbulkan *gharar* karena antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi tidak tahu berapa yang akan diterimanya (sejumlah uang pertanggungan) dan tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.⁹ Dalam asuransi konvensional peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Lain halnya pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dimana perusahaan telah menetapkan pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua yaitu masuk ke rekening khusus dimana uang ini akan diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain dana klaim dalam konsep asuransi syari'ah diambil dari dana *tabarru'* yang mereka kumpulkan dan dana shodaqoh yang diberikan oleh peserta dan satu lagi dimasukkan ke rekening pemegang polis.

⁹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 189

Pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang SEMARANG prinsip diatas merupakan prinsip yang sangat membedakan dengan asuransi konvensional. Adapun perbedaan konsep yang paling mendasar contohnya adalah:

1. Pada asuransi konvensional, peserta asuransi (nasabah) tidak akan menerima kembali uang yang telah disetorkan seandainya di tengah jalan berhenti berasuransi.
2. Pada asuransi syari'ah (Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang) peserta asuransi akan menerima kembali uang yang telah disetorkan dengan dipotong biaya administrasi.

B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Produk-Produk Di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah. Namun manusia (muslim) wajib berikhtiar untuk memperkecil resiko yang timbul, dan salah satu caranya adalah dengan menabung. Tetapi upaya tersebut sering kali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan.

Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wa ta'awanu alal birri wat taqwa*) serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang

saling menanggung satu sama lain dan dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu *gharar*, *maisir*, dan *riba*.

Pada prinsipnya produk-produk yang ada di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang berbeda dengan produk-produk yang ada di asuransi konvensional. Dalam hal menentukan premi, pemberian klaim, dan penentuan hasil usaha, pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga sedangkan pada Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Syamila Mubarakah merupakan salah satu produk Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta dan keluarganya dimasa yang akan datang yang sudah direncanakan sejak saat ini. Niat dan keinginan peserta juga diproteksi dengan asuransi kematian dimana bila peserta meninggal dunia maka kepada ahli waris akan diberikan santunan sejumlah manfaat Ta'awun.

Investa Mubarakah merupakan produk Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang yang dirancang khusus bagi peserta yang ingin menginvestasikan dananya untuk berbagai keperluan dimasa yang akan datang.

An-Nama' Mubarakah merupakan produk yang bertujuan sebagai dana simpanan peserta dengan harapan hasil investasi yang tinggi, disamping itu peserta dilindungi dengan asuransi kecelakaan

berupa meninggal dunia dan cacat tetap. *Dan* cara pembayaran premi (Nominal Polis) adalah tunggal, sedangkan cara pembayaran iuran ta'awun adalah tahunan dengan diambil langsung dari Nilai Tunai.

Sehat Mubarakah merupakan produk yang bertujuan memelihara kesehatan peserta beserta keluarganya berupa penggantian biaya perawatan atau pengobatan bila peserta di rawat inap di rumah sakit.

Pada produk-produk diatas yang dimiliki oleh Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang, bahwa premi unsur tabungan atau investasi akadnya dengan perusahaan adalah *wadi'ah yad-dhamanah*, sedangkan premi unsur ta'awun akadnya adalah wakalah. Yang mana dalam pembagian keuntungannya, perusahaan akan memberikan bonus berupa bagi hasil dari keuntungan atau hasil investasi dengan nisbah 60% untuk peserta. Dan biaya pemutusan akad sebelum polis berusia 1 tahun sebesar 1% untuk mata uang rupiah atau 0.5% untuk mata uang US Dollar.

Selain produk-produk diatas, Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang juga memiliki produk unggulan, yaitu program Ta'awun al-Khairat Lith Thulab. Produk ini merupakan program Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang yang secara khusus memberikan perlindungan berupa santunan meninggal dunia kepada ahli waris peserta asuransi apabila peserta tersebut meninggal dunia dan manfaat ta'awun kecelakaan kepada siswa/siswi beserta para guru

dan karyawan yang bekerja di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan manfaat ta'awun kecelakaan terdiri dari santunan meninggal dunia, cacat tetap total/sebagian dan santunan rawat inap di rumah sakit sebagai kaibat peserta mengalami kecelakaan.

Yang mana premi asuransinya (iuran ta'awun) adalah sejumlah uang yang dikumpulkan dari peserta yang secara sukarela dan tidak untuk diminta kembali, ditujukan untuk secara bersama-sama, memberikan santunan meninggal dunia dan manfaat ta'awun kecelakaan. Oleh karena premi (iuran ta'awun) asuransi ini kecil maka pelayanan tambahan dapat diberikan kepada siswa/siswi beserta para guru dan karyawan yang bekerja di lingkungan lembaga pendidikan berupa Asuransi Ta'awun Lith Thulab.

Seseorang yang telah mendaftarkan dirinya dan telah memenuhi persyaratan tersebut maka secara otomatis orang tersebut sudah menjadi anggota atau peserta asuransi, dan berkewajiban membayar premi sekaligus pada saat kontrak asuransi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per peserta untuk siswa/siswi dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta untuk umum. Sedangkan masa asuransi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah 1 (satu) tahun pertama berakhir dengan mengajukan surat permintaan perpanjangan asuransi.

Adapun manfaat dari Ta'awun al-Khairat Lith Thulab adalah apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa

asuransi, maka kepada ahli waris yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada ahli waris yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan apabila peserta mengalami cacat tetap total/sebagian akibat kecelakaan dalam masa asuransi, dibayarkan santunan secara proporsional sesuai table berikut, maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab III, Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang merupakan salah satu instansi asuransi syari'ah yang ada di Semarang yang dalam kinerjanya sesuai dengan sistem syari'ah dan dapat menegakkan ekonomi Islam serta produk-produk yang ada di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan mengenai penerapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah yang berkenaan dengan asuransi syari'ah serta prinsip-prinsip asuransi syari'ah di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang masih belum sempurna atau masih dalam tahap penyempurnaan, mengingat Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang masih dikategorikan perusahaan baru.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melihat dari berbagai uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam kinerjanya berpedoman pada fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, dan dalam operasionalnya implementasi fatwa tersebut telah terealisasi. Selain berpedoman pada fatwa tersebut Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam kinerjanya menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip dasar asuransi syari'ah. Adapun diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu, Prinsip Ketakwaan (*Tauhid*), Prinsip Keadilan (*Justice*), Prinsip Tolong-menolong (*Ta'awun*), Prinsip Kerja sama (*Cooperation*), Amanah (*trustworthy/al-amanah*), Prinsip Larangan Riba, Prinsip Larangan Maisyir (*Judi*), Prinsip Larangan Gharar (*Ketidakpastian*). Oleh karena itu pantaslah bila Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang merupakan salah satu pionir atau teladan bagi asuransi syari'ah lainnya. Dalam ketentuan mengenai akad, asuransi syari'ah mubarakah menggunakan akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Yang mana dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad *tijarah*

dan atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

2. Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wa ta'awanu alal birri wat taqwa*) serta perlindungan (*at-ta'min*), menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain dan dengan meniadakan tiga unsur yang masih dipertanyakan, yaitu *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Dan pada prinsipnya produk-produk yang ada di Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang berbeda dengan produk-produk yang ada di asuransi konvensional. Dalam hal menentukan premi, pemberian klaim, dan penentuan hasil usaha, pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga sedangkan pada Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Adapun produk-produk Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang diantaranya adalah Syamila Mubarakah, Investa Mubarakah, An-Nama' Mubarakah, Sehat Mubarakah dan program Ta'awun al-Khairat Lith Thulab.

B. SARAN-SARAN

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan.

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang hendaknya lebih disosialisasikan kepada masyarakat luas, sebagai perusahaan asuransi syari'ah yang tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan perasuransian tetapi juga sebagai tempat berinvestasi yang halal dan bermanfaat bagi keluarga dan ahli warisnya.
2. Perusahaan Asuransi Syari'ah Mubarakah cabang Semarang hendaknya lebih meningkatkan rasa tolong menolong yang tinggi, sehingga makin menambah kepercayaan masyarakat untuk ikut mengasuransikan hartanya demi masa depan.
3. Perlu adanya strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syari'ah. Maka Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemenuhan pemahaman masyarakat ini, misalnya apa itu asuransi syari'ah, bagaimana operasionalnya, dan keuntungan apa yang didapat dengan berasuransi kepada asuransi yang berprinsip syari'ah.
4. Transparasi dalam transaksi keuangan pada Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang sangat diperlukan, hal ini mengingat bahwa unsur transparasi merupakan langkah awal sebagai kepercayaan bagi peserta dan masyarakat umum, sekaligus sebagai *social accountability* lembaga tersebut.

C. PENUTUP

Dengan mengucap puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT. dengan taufik, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah Di Asuransi Syari’ah Mubarakah Cabang Semarang ” dalam bentuk yang sederhana sesuai kemampuan yang penulis miliki. Dan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan motivasi terhadap penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam segi analisis, bahasa dan referensinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik yang bersifat konstruktif dari siapa saja sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat diterima untuk memperoleh dan memenuhi, serta guna melengkapi syarat-syarat gelar sarjana Strata 1. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembacanya, Amien.

Wassalam.....

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam*, Jakarta Prenada Media, 2004.
- Ali, A. Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Ali, Daud, Mohammad, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta, Gramedia, 2006.
- Anshori, Ghofur, Abdul, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2008.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syari'ah*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- Basuki, Sulistya, *Pengantar Dokumentasi Ilmiah*, Jakarta, Kesaint Balang, 1989.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Djamil, H. Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos Publishing House, 1995.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990.
- Hasil wawancara dengan Imron pada tanggal 21 Maret 2008.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional cet 3, Jakarta, 2006.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Edisi Revisi Tahun 2006, Jakarta, CV. Gaung Persada, 2006.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2006.
- Lihat Brosur Produk Asuransi Syari'ah Mubarakah "An-Nama' Mubarakah".

- Lihat Brosur Produk Asuransi Syari'ah Mubarakah "*Investa Mubarakah*".
- Lihat Jurnal *PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah dalam Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan "2008"*.
- Lihat Profil Asuransi syari'ah Mubarakah.
- Lubis, k. Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Majalah Investor No. 59 edisi Juli 2002.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2004.
- Muslehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997.
- Nadzir, Ph.D, Muh., *Metodologi Penelitian*, Jakarta Galia Indonesia, 1998.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani (Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2007.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta, Paramadina, 2004.
- Salim, Abbas, H., *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sholahuddin, M., *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Singarimbun, Masri dkk, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Sula, Syakir, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General)*, Jakarta, Gema Insani, 2004.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali.
- Syamsuddin, Din, et al, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta : MUI Pusat.

Triandari, Sigit & Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, Salemba Empat, 2006.

Wawancara dengan Bapak Iman Supardi, Branch Manager Asuransi Syari'ah Mubarakah Semarang Tanggal 14 April 2008.

_____ dengan bapak Rosadi Subandriyo (Peserta Asuransi) pada tanggal 01 Agustus 2008.

_____ dengan bapak Muh. Salimi (peserta asuransi) pada tanggal 04 Agustus 2008

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005.

www.mui.or.id.

Yusdani, Mu'allim Amir, *Ijtihad dan Legislasi (Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Syukron
NIM : 2103237
Tempat tanggal lahir : Tegal, 16 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : DS. Debong Wetan RT.03 RW.02
KEC. Dukuhturi KAB. TEGAL 52192
Alamat di Semarang : Jln. Segaran Baru 01 No. 3A RT.04 RW 11
Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan
SEMARANG 50184

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. MI IHSANIYAH 03 Debong Tengah Tegal (1996)
2. MTS Mambaul Ulum Tegal Selatan Tegal (1999)
3. MAN Buntet Pesantren Cirebon (2003)
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup penulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Agustus 2008

Hormat saya,

(Muhammad Syukron)